

---

# IMPLEMENTASI WORK HOLIDAY VISA (WHV) SETELAH PENANDATANGANAN PERJANJIAN INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)

Frisca Noorliana Putri <sup>1</sup>, Chairul Aftah, S.IP, MIA <sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Work and Holiday Visa (WHV) dalam kerangka Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sebagai bagian dari dinamika kerja sama antara Indonesia dan Australia. IA-CEPA memperluas kerja sama bilateral tidak hanya pada liberalisasi perdagangan dan investasi, tetapi juga pada pergerakan orang (movement of natural persons). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi dokumen terhadap perjanjian resmi, laporan pemerintah, serta literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan perspektif liberalisme institusional untuk menjelaskan peran institusi dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IA-CEPA menyediakan kerangka normatif yang memperkuat kepastian regulasi dan peningkatan kuota WHV. Namun, efektivitas implementasinya tetap dipengaruhi oleh faktor domestik dan dinamika eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa institusi bilateral berperan dalam mengelola interdependensi, tetapi keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan di tingkat operasional.

**Kata Kunci:** IA-CEPA, Work and Holiday Visa, liberalisme institusional, mobilitas tenaga kerja, hubungan bilateral.

## Abstract

*This study analyzes the implementation of the Work and Holiday Visa (WHV) within the framework of the Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) as part of the evolving cooperation between Indonesia and Australia. IA-CEPA extends bilateral cooperation beyond trade and investment liberalization to include the movement of natural persons. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on document analysis of official agreements, government reports, and relevant academic literature. The analysis applies institutional liberalism to explain how formal institutions reduce uncertainty and enhance cooperation stability. The findings indicate that IA-CEPA provides a normative framework that strengthens regulatory certainty and expands WHV quotas. However, policy effectiveness remains influenced by domestic capacities and external dynamics. The study highlights that while bilateral institutions facilitate the management of interdependence, their success ultimately depends on consistent implementation at the operational level.*

**Keywords:** IA-CEPA, Work and Holiday Visa, institutional liberalism, labor mobility, bilateral relations.

## 1. PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami dinamika yang semakin kompleks dalam dua dekade terakhir, khususnya dalam konteks kerja sama ekonomi dan mobilitas sumber daya manusia. Penguatan hubungan tersebut ditandai dengan berlakunya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership

Agreement (IA-CEPA) pada 5 Juli 2020 sebagai kerangka institusional yang mengatur liberalisasi perdagangan, investasi, serta pergerakan orang (movement of natural persons). Tidak seperti perjanjian perdagangan konvensional yang berfokus pada penghapusan tarif, IA-CEPA dirancang sebagai kemitraan ekonomi komprehensif yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, pengembangan kapasitas, dan konektivitas antar masyarakat (DFAT, 2020).

Dalam konteks ekonomi politik internasional, kemunculan IA-CEPA tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya interdependensi ekonomi global serta kebutuhan negara untuk mengamankan kepentingan nasional melalui kerja sama bilateral yang lebih terstruktur. Ketidakpastian sistem perdagangan multilateral dan perubahan lanskap geopolitik kawasan Indo-Pasifik mendorong negara-negara middle power seperti Indonesia dan Australia untuk memperkuat instrumen kerja sama yang memberikan kepastian hukum dan stabilitas jangka panjang. Dalam kerangka liberalisme institusional, institusi formal seperti IA-CEPA dipahami mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan transparansi, serta menciptakan ekspektasi perilaku yang lebih stabil antarnegara (Keohane, 1984; Keohane & Nye, 1977). Dengan demikian, IA-CEPA berfungsi sebagai instrumen pengelolaan interdependensi melalui mekanisme aturan dan prosedur yang disepakati bersama.

Salah satu aspek strategis dalam IA-CEPA adalah pengaturan mobilitas tenaga kerja muda melalui skema Work and Holiday Visa (WHV) subclass 462. Program ini memungkinkan warga negara Indonesia berusia muda untuk tinggal dan bekerja sementara di Australia dalam durasi tertentu. Secara normatif, WHV diposisikan sebagai program pertukaran budaya dan penguatan hubungan people-to-people. Namun secara empiris, program ini juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan karena berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sementara di sektor-sektor tertentu di Australia, khususnya pertanian, perhotelan, dan pariwisata (Department of Home Affairs, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja temporer tidak hanya merupakan isu sosial-budaya, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi domestik.

Bagi Australia, dinamika demografi dan pasar tenaga kerja domestik menjadi faktor penting dalam menjelaskan relevansi program WHV. Penuaan penduduk serta ketatnya pasar tenaga kerja di wilayah regional menciptakan kebutuhan terhadap

skema migrasi temporer yang fleksibel (OECD, 2023). Sementara itu, bagi Indonesia, peningkatan kuota WHV pasca IA-CEPA membuka peluang mobilitas internasional bagi generasi muda dalam memperoleh pengalaman kerja dan peningkatan keterampilan. Dalam kerangka liberalisme institusional, skema ini dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang menghasilkan manfaat timbal balik melalui pengaturan institusional yang relatif stabil (Keohane, 1984).

Meskipun demikian, implementasi WHV tidak terlepas dari dinamika dan tantangan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pekerja migran temporer sering menghadapi kerentanan struktural, terutama dalam hal perlindungan kerja dan posisi tawar terhadap pemberi kerja (Howe & Owens, 2021). Selain itu, literatur yang ada cenderung berfokus pada implikasi normatif IA-CEPA atau kontribusi WHV terhadap pembangunan sumber daya manusia, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara penguatan kerangka institusional IA-CEPA dan efektivitas implementasi WHV di tingkat operasional masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam mengevaluasi sejauh mana institusi bilateral mampu meningkatkan kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan mobilitas tenaga kerja.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan Work and Holiday Visa (WHV) dalam kerangka Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), khususnya dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis fenomena kebijakan secara kontekstual serta menafsirkan makna di balik dinamika institusional yang terjadi (Creswell, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah kedua negara, naskah IA-CEPA, laporan dan publikasi resmi Department of Home Affairs Australia, dokumen kementerian terkait di Indonesia, serta laporan organisasi internasional dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Studi dokumen dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan institusi formal yang dapat ditelusuri melalui sumber tertulis yang kredibel (Bowen, 2009). Selain itu, data statistik mengenai kuota dan realisasi WHV pasca pemberlakuan IA-CEPA digunakan untuk memperkuat analisis secara empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, dan klasifikasi dokumen berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi substansi pengaturan mobilitas tenaga kerja dalam IA-CEPA serta dinamika implementasi WHV di tingkat bilateral (Krippendorff, 2013). Analisis ini memungkinkan peneliti menghubungkan norma dan komitmen dalam perjanjian dengan praktik kebijakan yang berkembang.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi, data diseleksi dan dikategorikan sesuai dengan variabel penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan dalam kerangka liberalisme institusional, khususnya terkait fungsi institusi dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan konsep institusi internasional dan interdependensi (Keohane, 1984).

### **3. PEMBAHASAN**

#### **IA-CEPA sebagai Kerangka Institusional Pengelolaan Mobilitas Tenaga Kerja**

Berlakunya Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) menandai fase baru dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Berbeda dengan perjanjian perdagangan konvensional, IA-CEPA memuat ketentuan mengenai pergerakan orang (movement of natural persons) yang memberikan landasan hukum bagi mobilitas tenaga kerja temporer, termasuk skema Work and Holiday Visa (WHV) subclass 462. Dalam perspektif liberalisme institusional, keberadaan IA-CEPA dapat dipahami sebagai institusi formal yang menyediakan seperangkat aturan dan prosedur guna mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan prediktabilitas dalam kerja sama bilateral (Keohane, 1984).

Melalui IA-CEPA, peningkatan kuota WHV bagi warga negara Indonesia menjadi salah satu bentuk konkret komitmen kerja sama. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan politik antarnegara, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan struktural dalam pasar tenaga kerja Australia. Dengan demikian, IA-CEPA berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan ekonomi domestik Australia dengan kepentingan pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam kerangka kerja sama yang terinstitusionalisasi (Keohane & Nye, 1977).

### **Dimensi Ekonomi Politik Work and Holiday Visa**

Salah satu implementasi konkret IA-CEPA adalah peningkatan kuota Work and Holiday Visa (WHV) subclass 462 bagi warga negara Indonesia. Secara normatif, WHV diposisikan sebagai program pertukaran budaya dan penguatan hubungan people-to-people. Namun secara empiris, program ini memiliki dimensi ekonomi politik yang signifikan. Pekerja WHV banyak terserap di sektor pertanian, perhotelan, dan pariwisata di Australia, sektor yang kerap mengalami kekurangan tenaga kerja domestik, khususnya di wilayah regional (Department of Home Affairs, 2023).

Kondisi demografis Australia, termasuk penuaan penduduk dan dinamika pasar tenaga kerja, memperkuat kebutuhan terhadap skema migrasi temporer yang fleksibel (OECD, 2023). Dalam konteks ini, WHV berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga ekonomis. Di sisi lain, bagi Indonesia, peningkatan kuota WHV membuka peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja internasional, peningkatan keterampilan, serta eksposur terhadap standar profesional global. Dalam kerangka interdependensi kompleks, mobilitas tersebut mencerminkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (Keohane & Nye, 1977).

### **Tantangan Implementasi dan Kesenjangan Institusional**

Meskipun IA-CEPA menyediakan landasan hukum yang lebih kuat, implementasi WHV menunjukkan bahwa penguatan institusional pada level perjanjian tidak secara otomatis menjamin efektivitas di tingkat operasional. Beberapa studi menunjukkan bahwa pekerja migran temporer rentan terhadap persoalan perlindungan kerja, ketidakseimbangan posisi tawar, serta keterbatasan akses informasi (Howe & Owens, 2021). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dalam perjanjian dan praktik di lapangan.

Selain itu, fluktuasi realisasi visa pascapandemi COVID-19 menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan pembatasan mobilitas global dan dinamika pasar tenaga kerja turut memengaruhi implementasi WHV. Dalam perspektif liberalisme institusional, kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas institusi tidak hanya ditentukan oleh desain aturan formal, tetapi juga oleh kapasitas domestik dan koordinasi antarlembaga dalam mengimplementasikan komitmen (Keohane, 1984). Dengan kata lain, IA-CEPA menyediakan kerangka stabilitas, namun keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada dinamika politik dan administratif di kedua negara.

### **Evaluasi Peran Institusi dalam Stabilitas Kerja Sama**

Analisis terhadap implementasi WHV pasca IA-CEPA memperlihatkan bahwa institusi bilateral memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian regulasi dan mekanisme dialog. Keberadaan komitmen tertulis dan forum konsultasi memungkinkan kedua negara untuk mengelola perbedaan kepentingan serta menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan situasi. Temuan ini menguatkan argumen bahwa institusi internasional mampu memfasilitasi kerja sama dan meningkatkan stabilitas hubungan, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan potensi friksi dalam implementasi (Keohane & Nye, 1977). Dengan demikian, IA-CEPA dapat dipahami sebagai instrumen pengelolaan interdependensi Indonesia–Australia dalam bidang ekonomi dan mobilitas manusia. Sementara itu, WHV menjadi manifestasi konkret dari bagaimana institusi bilateral diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional yang memiliki implikasi ekonomi politik bagi kedua negara.

## **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) berfungsi sebagai instrumen institusional yang memperdalam interdependensi antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam pengelolaan mobilitas tenaga kerja temporer. Keberadaan kerangka formal tersebut memperluas ruang kerja sama bilateral dengan memasukkan dimensi mobilitas manusia sebagai bagian dari agenda ekonomi yang lebih komprehensif.

Analisis dalam perspektif liberalisme institusional menegaskan bahwa institusi bilateral mampu menciptakan kepastian normatif dan menyediakan mekanisme

koordinasi dalam hubungan antarnegara. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor domestik, kapasitas administratif, serta dinamika eksternal yang berkembang. Dengan demikian, institusi tidak bekerja secara otomatis, melainkan berfungsi sebagai kerangka yang memfasilitasi interaksi dan penyesuaian kebijakan antaraktor negara.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan institusi formal merupakan prasyarat penting dalam mengelola interdependensi kompleks di era globalisasi. Secara empiris, studi ini memberikan kontribusi pada kajian Hubungan Internasional dengan menempatkan mobilitas tenaga kerja temporer sebagai bagian dari analisis ekonomi politik bilateral, bukan semata sebagai isu migrasi atau diplomasi publik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dimensi perlindungan pekerja dan dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia guna memperluas pemahaman mengenai implikasi strategis kerja sama ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. 2009. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2): 27–40.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). 2020. *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Text and Outcomes*. Canberra: Australian Government.
- Department of Home Affairs. 2023. *Working Holiday Maker Visa Program Report*. Canberra: Australian Government.
- Howe, J., & Owens, R. 2021. Temporary Labour Migration and the Protection of Migrant Workers: The Case of Australia. *Journal of Industrial Relations*, 63(1): 3–21.
- Keohane, R. O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.

Keohane, R. O., & Nye, J. S. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown and Company.

Krippendorff, K. 2013. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.

OECD. 2023. *International Migration Outlook 2023*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.